



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 Februari 2011

Halaman: 13

Mendukung, Dewan Minta Segera Direalisasikan

■ JUAL...

Sambungan dari hal 13

Disdik menemukan formula jitu. Yakni, pemberian penghargaan bagi seluruh pedagang di lingkungan sekolah yang berhasil menjual makanan sehat.

"Kami pikir, langkah pencegahan tidak bisa dilakukan dengan persuasif. Makanya, kami pilih langkah pemberian penghargaan ini yang juga bisa mendidik pedagang," jelasnya.

Agar cara tersebut bisa diterapkan dengan lancar, Disdik sudah mulai menyosialisasikan program tersebut ke pihak

sekolah. Sekolah yang akan mereka gandeng selanjutnya memberikan pelatihan kepada seluruh pedagang.

"Bagi pedagang yang sering berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lain ini yang menyulitkan identifikasi pihak sekolah. Makanya, kami sedang mencoba membangun komitmen bersama dengan sekolah," tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja Choirul Anwar mendukung rencana pemberian *reward* bagi pedagang yang menjual makanan sehat ini. Sebab, ancaman dari penggunaan zat berbahaya ini bagi anak usia SD dan TK lebih

berbahaya. "Kalau zat tersebut bekerja dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun, berarti mereka akan masih berada dalam usia remaja. Tapi sudah mengidap penyakit generatif," ingatnya.

Anwar juga mengusulkan agar program tersebut berjalan baik, sekolah bisa melakukan pendidikan bagi pedagang melalui usaha kesehatan sekolah (UKS) di masing-masing sekolah. "Mereka bisa menggandeng kami (Dinkes), Disperindagkoptan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian), serta BPOM sendiri," katanya.

MAli Fahmi, wakil ketua Komisi D DPRD Kota Jogja menilai,

eksekutif tak perlu menunggu adanya kejadian siswa yang menderita penyakit berbahaya untuk menerapkan reward tersebut. "Mereka (eksekutif) harus berjalan bersama antar-SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Tidak bisa ini hanya dilakukan Disdik saja. Karena, ada SKPD lain yang juga memiliki tupoksi di sini (peredaran makanan berbahaya)," tutur Fahmi terpisah.

Dia berharap rencana tersebut harus segera direalisasikan. "Kalau masalah anggaran jadi hambatan, bisa diusulkan pada APBD perubahan. Kami akan perjuangkan hal tersebut," janji Ali. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005